

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sesuai hasil perhitungan analisis *Location Quotient* (LQ) didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, hasil analisis *Static Location Quotient* (SLQ) menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki dua belas sektor basis. Kedua belas sektor basis tersebut adalah (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) sektor Konstruksi; (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (4) sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) sektor Informasi dan Komunikasi; (6) sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; (7) sektor Real Estat; (8) sektor Jasa Perusahaan; (9) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; (10) sektor Jasa Pendidikan; (11) sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (12) sektor Jasa Lainnya. Kedua, hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki lima belas sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Kelima belas sektor tersebut antara lain: (1) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) sektor Pertambangan dan Penggalian; (3) sektor Industri

Pengolahan; (4) sektor Pengadaan Listrik dan Gas; (5) sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) sektor Konstruksi; (7) sektor Transportasi dan Pergudangan; (8) sektor Informasi dan Komunikasi; (9) sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; (10) sektor Real Estat; (11) sektor Jasa Perusahaan; (12) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (13) sektor Jasa Pendidikan; (14) sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (15) sektor Jasa Lainnya.

Selanjutnya, hasil analisis SLQ dan DLQ digabungkan yang menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki sepuluh sektor unggulan yaitu (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Konstruksi; (3) Informasi dan Komunikasi; (4) Jasa Keuangan dan Asuransi; (5) Real Estat; (6) Jasa Perusahaan; (7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (8) Jasa Pendidikan; (9) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (10) Jasa Lainnya. Hasil lainnya didapatkan lima sektor andalan yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (5) Transportasi dan Pergudangan. Terakhir, terdapat dua sektor prospektif yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Ditinjau dari segi kebijakan, program kegiatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembangan ekonomi telah sesuai dengan sektor basis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diperkuat dari pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta berupa pajak daerah dan

retribusi daerah yang didominasi berasal dari sektor basis. Selain itu, data yang diperoleh dari BPS dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai data pendukung untuk membuktikan bahwa terdapat output yang dihasilkan dari masing-masing sektor.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang telah diterapkan pada sektor unggulan tetap dipertahankan dan dioptimalkan oleh pemerintah setempat sebagai penunjang stabilitas perekonomian daerah yang selanjutnya diharapkan dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri dan masyarakat di luar daerah;
- b. Pada sektor andalan, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kebijakan terus menerus agar dapat mencapai nilai output yang lebih maksimal sehingga pada masa yang akan datang sektor andalan dapat berubah menjadi sektor unggulan yang dimiliki daerah setempat;
- c. Pemikiran dan ide baru dibutuhkan dalam menyusun kebijakan pada sektor prospektif dengan harapan nilai output dari sektor tersebut dapat mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan menjadi sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan;

- d. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah dan retribusi daerah didominasi dari sektor unggulan dan sektor andalan sehingga diperlukan kebijakan yang dapat mengoptimalkan kedua sisi baik nilai output dari sektor unggulan dan sektor andalan maupun penerimaan daerah.